



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

**TRIWULAN III  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, Oktober 2021**



**NOTA DINAS**  
**NOMOR: 908 /IJ-IND.1/PR/X/2021**

Kepada Yth : Inspektur Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Laporan PP39 Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III tahun 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : Oktober 2021

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III (Juli-Oktober) 2021.

Realisasi keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan III tahun 2021 (Juli-Oktober) 2021 mencapai Rp5.397.992.233 atau sebesar 20,36% dari pagu anggaran sebesar Rp26.512.974.000,- dengan realisasi fisik sebesar 21,86%. Sehingga realisasi keuangan sampai dengan triwulan III (Januari-September) 2021 mencapai Rp18.057.173.874 atau sebesar 68,11% dari pagu anggaran dengan realisasi fisik sebesar 62,99%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal 

Liliek Widodo

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Triwulan III Tahun 2021 juga sebagai informasi atas capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama Triwulan III, untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Oktober 2021

**SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**



**LILIEK WIDODO**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Triwulan III Tahun 2021 juga sebagai informasi atas capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama Triwulan III, untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Oktober 2021

**SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**

**LILIEK WIDODO**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program .....	2
C. Struktur Organisasi .....	4
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN .....	5
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021 .....	5
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan .....	9
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN.....	20
A. Hasil Yang Telah Dicapai.....	20
B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran .....	20
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	42
D. Langkah Tindak Lanjut .....	42
BAB IV. PENUTUP .....	44
LAMPIRAN .....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 .....	5
Tabel 2 Alokasi anggaran dan aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 .....	6
Tabel 3 Informasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 ..	11
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021.	17
Tabel 5 Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	19
Tabel 6 Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2021 .....	33
Tabel 7 Realisasi kegiatan/output Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	40
Tabel 8 Kegiatan Fisik & Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2021 .....	41

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan adanya dukungan teknis, administrasi, dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;

4. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Jenderal;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik Negara, dan tata usaha milik Inspektorat Jenderal;
- b. Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

## **B. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di

mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja) dan penjamin mutu kegiatan unit kerja.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- 1. Bagian Umum** mempunyai tugas Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional**

## BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

### A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah "Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal", dengan rincian kegiatan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1 Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	6036.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	-
2.	6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	-
3.	6036.EAD	Layanan Sarana Internal	1 Unit	-
4.	6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	-
5.	6036.EAL	Layanan Monitoring dan evaluasi Internal	13 Laporan	-
6.	6036.QEC	Bantuan Produk	200 Paket	-

Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 mempunyai 6 (enam) output (keluaran) dengan anggaran sebesar Rp26.512.974.000,-. Untuk menghasilkan output tersebut, telah dialokasikan anggaran melalui kegiatan-kegiatan (aktivitas) sebagai berikut :

Tabel 2 Alokasi anggaran dan aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal  
Tahun 2021

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		26.512.974.000
6036.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	20.794.871.000
6036.EAA.001	Layanan Perkantoran Inspektorat Jenderal		20.794.871.000
001	Gaji dan Tunjangan		15.467.091.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		15.467.091.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.327.780.000
A	Honorarium Operasional		1.918.357.000
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		461.575.000
C	Biaya langganan dan operasional perkantoran		1.192.630.000
D	Koordinasi dan layanan pimpinan		873.388.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		881.830.000
6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	3.683.403.000
6036.EAB.001	Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		3.683.403.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		581.225.000
A	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2022		152.000.000
B	Penyusunan dan Revisi RKAKL Inspektorat Jenderal		63.165.000
C	Penyusunan anggaran 2022		12.000.000
D	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		9.100.000
E	BIMBINGAN DAN PENGAWASAN ASPEK PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		344.960.000
053	Pengelolaan Keuangan		303.420.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		117.640.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN		71.250.000
C	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN		11.890.000
D	Penyusunan RKBMN		1.560.000
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		5.080.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		96.000.000
055	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		533.908.000
A	Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum		138.408.000
B	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		18.200.000
C	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja		20.200.000
D	Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor		9.400.000
E	Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Inspektorat Jenderal		10.200.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
F	Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian		337.500.000
056	Pengelolaan Kepegawaian		570.704.000
A	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal		153.654.000
B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal		282.250.000
D	Pelatihan di Kantor Sendiri (In House Training)		39.000.000
E	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		31.000.000
F	Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		27.400.000
G	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai Itjen		13.000.000
J	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Itjen		9.400.000
K	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		15.000.000
057	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		834.456.000
A	Koordinasi dalam rangka penataan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat Jenderal		105.340.000
B	Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif		14.000.000
C	Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan		670.956.000
D	Pengembangan Informasi Pengawasan		44.160.000
059	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler		163.536.000
A	Pemutakhiran data dan Informasi		11.036.000
B	Penerbitan Masalah Solusi		152.500.000
060	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		696.154.000
A	Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian		23.016.000
B	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		16.050.000
C	Penilaian Index Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian		119.890.000
D	Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		120.650.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian		149.268.000
F	Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan		267.280.000
6036.EAD	Layanan Sarana Internal	1 Unit	647.540.000
6036.EAD.01	Layanan Sarana Internal Inspektorat Jenderal		647.540.000
052	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi		647.540.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		647.540.000
6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	346.420.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
6036.EAK.001	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		346.420.000
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		346.420.000
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran data tindak lanjut		170.340.000
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		110.360.000
C	Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		15.720.000
D	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan		50.000.000
6036.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13 Laporan	440.740.000
6036.EAL.001	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Inspektorat Jenderal		440.740.000
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		182.760.000
A	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja		173.440.000
B	Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan, Reviu Perkin		1.100.000
C	Penyusunan dan Reviu LAKIN Itjen dan Set Itjen		1.100.000
D	Fasilitasi Penilaian SAKIP Eselon II Itjen		1.760.000
E	Reviu Renstra		4.480.000
F	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		880.000
052	Penyusunan Laporan		257.980.000
A	Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan		88.120.000
B	Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri		109.200.000
C	Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		3.960.000
D	Penyusunan Laporan APIP		3.400.000
E	Fasilitasi Penilaian SAKIP Eselon I		1.100.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		52.200.000
6036.QEC	Bantuan Produk	200 Paket	600.000.000
6036.QEC.001	Bantuan Masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000
051	Pengadaan masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000
A	Pengadaan masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000

## **B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan**

Sasaran program/ kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
3. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif;
4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien;
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan aktivitas yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Pengelolaan Data dan Informasi;
4. Pengelolaan Keuangan;
5. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal;
6. Pengelolaan Kepegawaian;
7. Pelayanan Umum dan Perlengkapan;
8. Pelayanan Humas dan Protokoler;
9. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi;
10. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi;
11. Gaji dan Tunjangan;
12. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Hubungan Sasaran dan Program serta aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah disahkan dalam perjanjian kinerja dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3 Informasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
1.	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi (IKU)	91,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal</li> <li>- Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan</li> <li>- Temu Teknis Penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> </ul>
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan Informasi terkait terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti</li> </ul>
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum</li> </ul>
		Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dan Informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal</li> </ul>
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)</li> <li>- Penilaian Mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih</li> </ul>
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Indeks Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
3.	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring &amp; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal;</li> </ul>
		Peningkatan level kapabilitas APIP (IACM) *)IKU	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian SAKIP Eselon I;</li> <li>- Penyusunan kebijakan pengawasan tahun 2022;</li> <li>- Peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal;</li> <li>- Peningkatan kerja sama SDM pegawai Inspektorat Jenderal JPT dan JFU (Team Building);</li> <li>- Penerbitan Majalah Solusi ;</li> <li>- Penilaian SAKIP Eselon I Inspektorat Jenderal;</li> <li>- Penilaian SAKIP eselon II Itjen;</li> <li>- Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja</li> <li>- Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Penyusunan Laporan Analisis dan evaluasi hasil Pengawasan Tematik</li> <li>- Analisis dan evaluasi hasil pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industry</li> <li>- Penyusunan dan reviu LAKIP Itjen dan Set</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
				Itjen - Koordinasi analisis dan evaluasi pelaporan hasil pengawasan - Reviu Renstra - Penyusunan dan revisi RKAKL Inspektorat Jenderal
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
4.	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25%	- Pengembangan Informasi Pengawasan;
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%	- Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan program prioritas tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal - Evaluasi kelembagaan internal organisasi Inspektorat Jenderal;
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	- Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal; - Koordinasi penyusunan Perjanjian kinerja dan Rencana Kinerja; - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan dan Reviu Perkin;
		Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	90%	- Pemutakhiran Data dan Informasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Peta pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal</li> <li>- Analisa Beban Kerja</li> <li>- Penyusunan pengembangan kompetensi di lingkungan Inspektorat Jenderal</li> </ul>
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi penilaian reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal</li> <li>- Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> </ul>
5.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan di Kantor Sendiri</li> <li>- Pemantauan dan Penilaian kinerja Individu pegawai Itjen;</li> <li>- Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional auditor;</li> <li>- Pemetaan Job Profilling jabatan fungsional umum pegawai ITJEN</li> </ul>
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan analisa kebutuhan diklat pengembangan kompetensi pegawai Itjen</li> <li>- Assesment kompetensi pegawai Itjen</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan diklat dengan BPSDMI</li> <li>- Penilaian Angka Kredit</li> <li>- Evaluasi Prestasi Kinerja Pegawai</li> </ul>
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	92%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pemantauan penerapan kode etik auditor;</li> <li>- Internalisasi penerapan kode etik auditor.</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
		Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan dan penghapusan arsip/dokumen pengawasan dari arsip inaktif;</li> <li>- Koordinasi dalam rangka penataan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat Jenderal;</li> <li>- Bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian;</li> <li>- Pelayanan umum dan rapat kedinasan;</li> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN;</li> <li>- Bimbingan dan pengawasan aspek keuangan di lingkungan Kementerian Perindustrian;</li> <li>- Pelayanan Perbendaharaan;</li> <li>- Pemeliharaan sarana dan prasarana operasional kantor;</li> <li>- Koordinasi dan sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN;</li> <li>- Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif;</li> <li>- Gaji dan tunjangan;</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan;</li> <li>- Honorarium dan Operasional</li> <li>- Biaya langganan dan operasional kantor;</li> <li>- Persediaan dan perlengkapan kantor;</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan pimpinan;</li> <li>- Pengelolaan administrasi kepegawaian</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan
				Inspektorat Jenderal; - Fasilitasi Reviu RKAKL; - Fasilitasi beban masa tugas menjelang pension PNS Inspektorat Jenderal.

➤ **Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2021 adalah :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal *)IKU	2 laporan
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti *)IKU	4 laporan
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 laporan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Koordinasi Penilaian Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	1 kegiatan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	Level 3
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan	Ketersediaan Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan	25%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Efisien	oleh auditor	
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%
		Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%
		Ketersediaan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%
		Komponen pengungkit penerapan RB di unit Itjen	91%
5.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%
		Kepatuhan terhadap kode etik auditor dalam menjalankan tugas pengawasan	92%
		Terselenggaranya layanan perkantoran Inspektorat Jenderal	12 Bulan Layanan

\*) Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dan *tagging* Sekretariat Inspektorat Jenderal

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan (Output)**

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Layanan Perkantoran;

2. Tersedianya Layanan Perencanaan & penganggaran Internal;
3. Tersedianya Layanan Sarana Internal;
4. Tersedianya Layanan Pengawasan Internal;
5. Tersedianya Monitoring & Evaluasi Internal;
6. Bantuan Produk.

Tabel 5 Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	-	1 layanan
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	-	-	-	1 layanan
3	Layanan Sarana Internal	1 Unit	-	-	-	1 unit
4	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan
5	Layanan Monitoring dan evaluasi Internal	13 Laporan	4	2	2	5 Laporan
6	Bantuan Produk	200 Paket	-	200 paket	-	-

### **BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN**

#### **A. Hasil Yang Telah Dicapai**

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan III tahun 2021 (Januari-September) 2021 mencapai Rp18.057.173.874,- atau sebesar 68,11% dari pagu anggaran sebesar Rp26.512.974.000,- dengan realisasi fisik sebesar 62,99 % (Berdasarkan Form A).

#### **B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran**

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021 adalah Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal. Sampai bulan September 2021, hampir semua kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal telah terlaksana sesuai dengan rencana. Kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah terlaksana pada triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan perencanaan anggaran tahun 2021 pada triwulan III dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Sehubungan dengan Surat Menteri Perindustrian Nomor B/41/M-IND/KU/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Realokasi Anggaran dalam Rangka Pemberian Bantuan Oksigen, Tabung Oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator dan oksigen Generator serta program pengendalian IMEI Nasional, dapat disampaikan bahwa Kemenperin menyiapkan bantuan untuk mengatasi masalah ketersediaan pasokan yang dibutuhkan oleh rumah sakit sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi penanganan Covid-19 terkait rumah sakit lapangan di Wisma Haji, Oksigen Medis dan potensi Fraud di Bandara (Hotel Karantina) dan Rapat koordinasi penyediaan suplai oksigen untuk Covid-19. Bantuan diberikan berupa gas oksigen,

tabung oksigen, oksigen konsentrator, isotank, dan oksigen regenerator kepada rumah sakit melalui Kemenkes dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp370.000.000.000,-. Untuk kegiatan ini, Inspektorat Jenderal harus merealokasikan anggaran sebesar Rp2.182.086.000,-.

- Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif Tahun 2022;
- Telah dilaksanakan revisi DIPA ke-4 (19 Agustus 2021) dan ke-5 (15 September 2021) dan penyusunan revisi DIPA ke-6 masih dalam tahap proses penyelesaian;
- Adapun Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 40.643.630.000, dengan rincian per Eselon II sebagai berikut:

Unit Eselon II	Anggaran
Inspektorat I	2.108.753.000
Inspektorat II	2.050.000.000
Inspektorat III	2.050.000.000
Inspektorat IV	2.050.000.000
Sekretariat ITJEN	32.384.877.000

## 2. Pengembangan SDM

Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan III (Juli-September 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi penerimaan CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2021;
- b. Koordinasi penyusunan formasi perencana dan penyusunan perhitungan formasi perencana pertama, muda, madya dan utama di lingkungan Inspektorat Jenderal;

- c. Pelantikan auditor pertama an. Indra Irwan, Gunung Gumilar, Elizabeth Frycillya A, Noer Dwi Rizkia P;
- d. Penyusunan rekapitulasi LPAK (Lembar Pengajuan Angka Kredit) Auditor ;
- e. Reviu 18 SOP Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
- f. Koordinasi terkait penataan pegawai untuk Draft Permenperin Koordinator dan Subkoordinator;
- g. Koordinasi dan Sosialisasi pemutakhiran data mandiri SAP BKN dengan Biro OSDM di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- h. Sosialisasi evaluasi dan penyusunan gugus tugas jabatan fungsional auditor Inspektorat Jenderal TA 2022;
- i. Koordinasi pendaftaran peserta pada konferensi nasional IIA;
- j. Koordinasi pergantian rekening payroll pegawai Inspektorat Jenderal dari BNI ke BRI;
- k. Penyusunan Surat Pemanggilan, ST Pemeriksaan, Berita acara pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin;
- l. Perhitungan formasi JFA Sekretariat Inspektorat Jenderal dan konsultasi dengan BPKP.

Indikator bagian kepegawaian dalam renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal “Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan” selama periode sampai dengan Triwulan III mencapai 57,1%. Perhitungan capaian diperoleh dari pelaksanaan PKS sebanyak 4 PKS, yaitu

1. Penilaian Mandiri SPIP/MRI;
2. PKS penilaian SAKIP tahun 2020;
3. PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP dan
4. PKS Overview Manajemen Resiko Indeks.

Empat PKS tersebut dibagi dengan jumlah diklat substansi yang telah dilaksanakan sebanyak 7 diklat

substansi yang telah diikuti oleh auditor dan dikali 100%. Diklat substansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
2. Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
3. Diklat Program Sertifikasi Auditor Forensik (CFrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
4. Pelatihan dan Sertifikasi CGAA Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
5. Pelatihan dan Sertifikasi CRMO Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
6. Webinar Risk Management Based On ISO 31000: 2018 dan;
7. Webinar Professional Risk Management Training Certification.

### 3. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil monitoring kegiatan pada Triwulan II, capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal sebesar 37% dari target indikator sebesar 91,5%. Karena capaian ini masih jauh target, maka pimpinan mengarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan percepatan penyelesaian tindak lanjut oleh satker. Untuk melaksanakan arahan tersebut, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pengawasan Internal;
- b. Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada Seluruh Unit Eselon I

Kementerian Perindustrian selesai dilaksanakan tanggal 14-23 September 2021. Capaian indikator tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai sampai dengan Triwulan III tahun 2021 adalah 100%;

- c. Sosialisasi Pra Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Unit Dekonsentrasi dengan Inspektorat Kemendagri dan Inspektorat Pemerintah Daerah telah selesai dilaksanakan;

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, capaian indikator pada renstra rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker di triwulan III mencapai 51% dari total rekomendasi 610. Tindak lanjut yang sesuai rekomendasi sebanyak 238, tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 71 dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 301.

#### 4. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal

Dalam rangka mendukung tindak lanjut pengawasan eksternal, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (verifikasi tahap awal Subbagian PTLHP);
- b. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dilakukan secara rutin. Tindak Lanjut BPK per juli mencapai progress 87,55% (penyerahan dokumen TL dari BPK ke bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan per Juli 2021).

Salah satu kegiatan yang menjadi indikator dalam renstra yaitu batas toleransi temuan material

pengawasan eksternal telah tercapai sebesar 0,033% (target indikator renstra tercapai) diperoleh dari temuan BPK Rp 653.625.627,60 dibagi realisasi anggaran Kemenperin TA 2020 Rp 1.975.729.108.365;

5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- a. Monitoring capaian kinerja Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2021 pada Aplikasi Smart DJA dan E-Monev Bappenas;
- b. Penyelesaian laporan evaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal rutin setiap bulan;
- c. Koordinasi fasilitasi penilaian SPIP/MRI di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui kegiatan: pembentukan tim pembangun dan tim penilai di lingkungan Itjen, koordinasi pembentukan tim penilai dan tim penjamin kualitas di Kementerian Perindustrian, Koordinasi pengisian Kertas Kerja Evaluasi (KKE) serta Tata cara penjaminan kualitas;

6. Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan

Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan yang dilaksanakan selama Triwulan III (Juli-September 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penilaian PMPZI Tahun 2021 sampai dengan rapat pleno hasil PMPZI . Hasil rapat pleno mengusulkan 31 satker (14 diusulkan WBBM dan 17 diusulkan WBK). Satker yang memperoleh predikat WBBM adalah sebagai berikut:
  1. Baristand Industri Banjarbaru;
  2. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar;
  3. SMK-SMTI Pontianak;

4. Politeknik STTT Bandung;
5. Balai Besar Tekstil Bandung;
6. Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta;
7. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo;
8. SMK-SMTI Yogyakarta;
9. Baristand Industri Samarinda;
10. Balai Diklat Industri Surabaya;
11. Politeknik ATI Padang;
12. Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta;
13. Baristand Industri Pontianak;
14. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung.

Sedangkan Satker yang memperoleh predikat WBK adalah sebagai berikut:

1. Baristand Industri Palembang;
2. Balai Diklat Industri Jakarta;
3. SMK-SMTI Banda Aceh;
4. SMK-SMAK Makassar;
5. Baristand Industri Medan;
6. Balai Diklat Industri Yogyakarta;
7. Balai Diklat Industri Makassar;
8. Balai Besar Keramik Bandung;
9. Politeknik AKA Bogor;
10. SMK-SMTI Bandar Lampung;
11. Baristand Industri Ambon;
12. Balai Diklat Industri Denpasar;
13. Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung;
14. Balai Besar Industri Agro Bogor;
15. Balai Besar Logam dan Mesin Bandung;
16. Politeknik STMI Jakarta;
17. SMTI Makassar.

- b. Koordinasi persiapan LKE Satker yang diusulkan WBK/WBBM kepada KemenPAN RB dan submit unit menuju WBK/WBBM di aplikasi MenPAN RB;
- c. Kegiatan Penyusunan Berita Acara dan Laporan kegiatan penilaian ZI tahun 2021 masih dalam proses penyusunan;
- d. Koordinasi Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Kementerian Perindustrian pada Periode B09 selesai dilaksanakan;
- e. Laporan Analisa Hasil Pengawasan Monev IOMKI;
- f. Survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan Zona Integritas.

#### 7. Pengelolaan Keuangan

Kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan selama Triwulan III (Juli-September 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan yang rutin setiap bulan;
- b. Pelaporan capaian output ke KPPN;
- c. Koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan;
- d. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;
- e. Koordinasi dengan Biro Keuangan terkait Sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN;
- f. Penyusunan Laporan Perbendaharaan rutin tiap bulan;
- g. Penyusunan Laporan Barang dan Jasa Semester I Tahun 2021.

## 8. Pelaksanaan PKPT Triwulan III

PKPT merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

PKPT yang dijadikan dasar dalam penyusunan evaluasi ini adalah PKPT awal yang diserahkan oleh masing-masing Inspektorat pada akhir tahun 2020. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada masing-masing Inspektorat belum sesuai dengan perencanaan atau PKPT awal, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan *timeframe* dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tidak dicantumkan dalam PKPT.

Pada awal semester II, Kegiatan Inspektorat I yang sesuai dengan dokumen PKPT ialah Reviu LK-BMN Setjen yang mulai dilakukan di pertengahan bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021. Kegiatan lain yang telah dijadwalkan seperti Reviu RKA-K/L BPSDMI dan Audit Poltek Morowali tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kegiatan lainnya adalah kegiatan Non PKPT (kegiatan sesuai arahan dari pimpinan) pengawasan dan pengawalan Implementasi Instruksi Menteri No 1 tahun 2021 dan pelaksanaan Desk Reviu kegiatan beresiko (konstruksi, mesin/peralatan, diklat 3 in 1, pengadaan tanah dan jasa konsultasi). Sedangkan di bulan Agustus, Kegiatan yang sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan adalah reviu LKBMN BPSDMI. Kegiatan yang direncanakan, namun tidak terealisasi adalah penilaian MRI yang rencananya akan dilaksanakan di bulan berikutnya. Kegiatan Non PKPT yang dilaksanakan adalah pengawasan

progress pembangunan gedung AKOM Solo, reviu revisi anggaran pada BPSDMI dan peran APIP K/L dalam pengawasan atas perencanaan dan penganggaran. Kegiatan Inspektorat I di bulan September adalah melanjutkan kegiatan pengawasan yang dilakukan di bulan selanjutnya. Selain itu juga terlaksana kegiatan non PKPT seperti monitoring bantuan masker pada BPSDMI, mengikuti layanan konsultasi (Coaching Clinic secara online), pengawasan seleksi tes CPNS di Lingkungan Kemenperin.

Kegiatan pengawasan Inspektorat II di semester II ini yang sesuai dengan jadwal yang direncanakan di dokumen PKPT adalah audit Dana dekonsentrasi dan Reviu LK-BMN Ditjen ILMATE dan IKMA. Sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah Reviu RKA-K/L dan kegiatan Non PKPT seperti pengawasan pelaksanaan IOMKI dan pemenuhan kebutuhan oksigen pada masa PPKM darurat, Pengawasan ketersediaan oksigen medis dan kegiatan-kegiatan sesuai arahan pimpinan lainnya. Sedangkan di bulan Agustus, kegiatan yang direncanakan di PKPT sama seperti yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya kegiatan yang direncanakan di PKPT tetapi juga kegiatan lain seperti pengawasan pengadaan CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan Kemenperin, Penyelesaian Permohonan Tanggapan Terhadap Draft Perjanjian Hibah CEIR, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Dekonsentrasi Pada Disperindag Provinsi NTT, Koordinasi Pemantauan IOMKI dan Evaluasi Harga Gas Bumi Tertentu pada PT Krakatau Steel dan keikutsertaan dalam rapat-rapat terkait kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan Inspektorat II di bulan September sama dengan kegiatan Inspektorat I yaitu melanjutkan kegiatan pengawasan di bulan sebelumnya.

Kegiatan Inspektorat III pada bulan Juli yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal PKPT adalah Reviu RKA-K/L dan Reviu LK-BMN Satker Cakupan tugas IR III. Reviu RKA-K/L yang dilaksanakan terkait pemotongan anggaran dalam rangka pemberian bantuan oksigen, tabung oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator dan oksigen generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional BSKJI (Beserta Unit Vertikalnya), Itjen dan Pusdatin. Kegiatan Reviu RK-BMN yang seharusnya juga dilaksanakan di bulan Juli, sebagian telah dilaksanakan di bulan Juni. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan non PKPT (Sesuai arahan pimpinan) seperti Monitoring dan pengawalan implementasi IOMKI pada satker Pusdatin, Pengawasan dan Pengawalan pada perusahaan Industri dalam rangka pemantauan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 guna penyediaan bantuan oksigen dalam masa kedaruratan Covid-19, dsb. Sedangkan kegiatan Inspektorat III dibulan agustus yang sesuai dengan rencana PKPT adalah kegiatan pengawalan yang dilaksanakan terkait Implementasi IOMKI pada Satker BSKJI dan Pusdatin, pengawalan SPPT-SNI pada unit pelaksana teknis BSKJI. Kegiatan lain yang terlaksana tidak sesuai dengan PKPT, yaitu Reviu RKA-KL pagu indikatif 2022 Inspektorat Jenderal dan Reviu LKBMN Semester I TA 2021 pada BSI, BBKK, BBIA, Baristand Padang, Baristand Bandar Lampung, BBIHP Makassar, Baristand Medan, Baristand Samarinda, Baristand Ambon dan Baristand Manado. Kegiatan pengawasan Inspektorat III di bulan September di dokumen PKPT adalah kegiatan Pengawalan dan Consulting satker cakupan tugas Inspektorat III. Kegiatan pengawasan di bulan September telah sesuai dengan PKPT.

PKPT Inspektorat IV pada bulan Juli 2021 yang sesuai dengan jadwal PKPT yang telah direncanakan adalah Reviu LK

Ditjen IA, IKFT dan KPAII, Reviu Laporan Keuangan dan BMN Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kegiatan yang telah direncanakan di bulan Juli seperti pemutakhiran peta resiko 2021 dan pendampingan penyusunan peta risiko satker cakupan tugas IR IV tidak dilaksanakan. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan di bulan Juli adalah Reviu revisi realokasi pagu TA 2021 Ditjen KPAII, Reviu RKA-K/L Ditjen IA dan Ditjen KPAII, Reviu Usulan RKA-K/L berdasarkan Pagu Indikatif TA 2020 Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kegiatan lainnya adalah kegiatan non PKPT seperti Pengawasan dan pengawalan Industri Oxygen Kesehatan Covid-19, Pengawalan penerbitan dan pelaksanaan IOMKI serta penyediaan oksigen medis selama PPKM darurat pada satker cakupan tugas Inspektorat IV, Pemantauan vaksinasi Industri dan implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021 (IOMKI) Ditjen Industri Agro. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat IV di bulan Agustus 2021 yang sesuai dengan rencana PKPT ialah kegiatan reviu revisi DIPA dan kegiatan pengawalan. Kegiatan lain yang terlaksana ialah kegiatan Non PKPT seperti Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan mesin dan/atau peralatan pembuatan obat tradisional (hibah mesin/peralatan dalam rangka revitalisasi industri obat tradisional TA 2020), Pemantauan Implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021 (IOMKI) dan kesiapan Industri menghadapi Pandemi Ditjen Industri Agro di PT Sampoerna. Kegiatan pengawasan Inspektorat IV di bulan September 2021 menurut PKPT adalah audit kinerja Pusat P3DN, Audit kegiatan beresiko tinggi 2021 dan Audit reviu pagu alokasi 2022. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di bulan September 2021 sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pengawasan Inspektorat IV sesuai dengan PKPT. Kegiatan lain yang terlaksana ialah

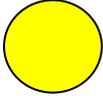
kegiatan Non PKPT. Kegiatan tersebut adalah Pengawasan program restrukturisasi mesin/peralatan pada industri penyempurnaan kain dan industri percetakan kain sesuai permenperin no 18 tahun 2021, Penilaian Kembali BMN di pabrik gula PT Perkebunan Nusantara II Deli Serdang, Pengawasan dan pelaksanaan program kegiatan Direktorat ASDIPI Tahun 2021, Pengawasan pemetaan kebutuhan garam industri selain dari impor, Pengawasan verifikasi kebutuhan bahan baku jagung dalam industri makanan, Penyusunan RSNI Sistem Harmonisasi Global Ditjen IKFT, Penilaian BMN PMPP Ditjen Industri Agro di Takalar Sulsel.

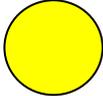
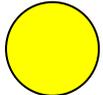
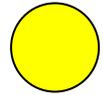
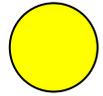
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen PKPT, sebagian besar dari segi waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi serta juga disesuaikan dengan arahan dari pimpinan masing-masing eselon II Inspektorat Jenderal.

Tabel 6 Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian TL atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan hasil pengawasan internal;</li> <li>- Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK</li> <li>- Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya</li> <li>- tindak lanjut saldo dekon dan pemutakhirannya</li> <li>- Pembahasan tindak lanjut audit kinerja BPK</li> <li>- Menginventarisir Data Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI per-Unit Kerja</li> <li>- <b>Rekomendasi hasil pengawasan internal s/d 29 September 2021 sebesar 51% dari 610 total rekomendasi</b></li> </ul>	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian;</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan.</li> </ul>	<p>Penanganan pengaduan masyarakat selama periode caturwulan II 2021 (Mei-Agustus) 2021 telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 90 pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat dilakukan secara online dan bersifat tidak berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti dan telah disampaikan seluruhnya pada unit yang wajib menjawab. Sedangkan pengaduan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sesuai ketentuan. Periode sebelumnya yaitu pada Caturwulan I (Januari-April) 2021 Kemenperin mendapatkan 93 pengaduan, sehingga</p>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
				total sampai dengan Caturwulan II, <b>total pengaduan seluruhnya berjumlah 183 aduan. Namun seluruh pengaduan tersebut tidak berkadar pengawasan</b> berdasarkan Nota Dinas Laporan Kegiatan Pengaduan masyarakat Cawu I dengan Nomor 04/IJ-IND.1/KK/V/2021 dan Cawu II Nomor 06/IJ-IND.1/KK/IX/2021.	
		Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	- Audit kinerja masing-masing Inspektorat berjalan sesuai dengan PKPT yang telah disusun - Reviu RKA-KL - <b>Capaian indikator ini akan terlihat diakhir TW IV.</b>	
		Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi.	- Koordinasi dengan unit kerja pusat dan vertikal dalam rangka penyelesaian tindak lanjut saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, penyerahan dokumen dari BPK per Juli 2021, tindak lanjut mencapai 87,55%. - Kegiatan Audit maupun reviu LK-BMN yang dilaksanakan di TW III oleh masing-masing Inspektorat sebagian besar telah sesuai dengan PKPT yang direncanakan di awal tahun - Pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi telah dilaksanakan oleh pimpinan masing-masing eselon II di TW III. - BPK telah Me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana Laporan Nomor 7b/LHP/XV/05/2021 - <b>Capaian batas toleransi material sebesar 0,033%, telah memenuhi target</b>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
				yang ditetapkan. Perhitungan pemeriksaan tersebut diperoleh dari temuan BPK Rp 653.625.627,60 dibagi realisasi anggaran Kemenperin TA 2020 Rp 1.975.729.108.365	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum komunikasi PMPRB</li> <li>- Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Mandiri PMPRB, telah dilaksanakan Panel I-III penilaian mandiri PMPRB telah dilaksanakan di TW II.</li> <li>- <b>Hasil PMPRB telah diperoleh indikator kinerja telah tercapai, Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB (5.61/6.25)*100%=89.76%</b></li> <li>- Kegiatan Penilaian PMPZI Tahun 2021 sampai dengan rapat pleno hasil PMPZI. Hasil rapat pleno mengusulkan 31 satker (14 diusulkan WBBM dan 17 diusulkan WBK).</li> <li>- Kegiatan Penyusunan Berita Acara dan Laporan kegiatan penilaian ZI tahun 2021 masih dalam proses penyusunan.</li> <li>- Survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan Zona Integritas.</li> </ul>	
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi fasilitasi penilaian SPIP/MRI di lingkungan Kementerian Perindustrian.</li> <li>- Persiapan penilaian mandiri SPIP/MRI di lingkungan Inspektorat Jenderal.</li> <li>- Pembentukan tim penilai mandiri dan tim penjamin kualitas penilaian SPIP/MRI Kemenperin.</li> </ul>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring &amp; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri</li> <li>- Pelaksanaan Penelaahan Sejawat</li> </ul>	Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan November.	
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu LAKIP</li> <li>- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3</li> <li>- Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP</li> <li>- Penilaian SAKIP Eselon II</li> <li>- Pra evaluasi SAKIP ITJEN</li> <li>- Penilaian SAKIP Es I Kemenperin</li> </ul>	- Semua kegiatan pendukung telah dilaksanakan. Namun <i>Self Assesment</i> Capaian IACM belum dilaksanakan.	
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebagai pendukung kegiatan audit rutin dilaksanakan.</li> <li>- Pengadaan laptop di bulan Juni sebanyak 20 Unit ASUS Vivobook K14 dan di bulan September 1 Unit ASUS ROG Zephyrus G14.</li> </ul>	
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Informasi Pengawasan</li> <li>- Pengelolaan Media Informasi Pengawasan</li> <li>- Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal</li> <li>- Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi</li> <li>- Penerbitan Majalah Solusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan informasi masih dalam tahap pengembangan</li> <li>- Pengembangan informasi Inspektorat Jenderal melalui media social (Instagram dan media massa online)</li> </ul>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan</li> <li>- Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa pedoman masih dalam proses penyelesaian;</li> <li>- Pada Bulan Juli 2021, 18 SOP Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi telah di reviu;</li> <li>- Pada Bulan Agustus 2021, Penyusunan konsep SOP PTLHP dengan menyesuaikan pada peraturan Inspektur Jenderal Nomor 176 Tahun 2019 (SOP Terakhir belum relevan dengan perirjen).</li> </ul>	
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Program Pengawasan</li> <li>- Penyusunan Jakwas Tahun 2022</li> <li>- Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal</li> <li>- Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilakukan monitoring PKPT setiap bulannya dengan hasil Sebagian besar kegiatan tidak sesuai dengan rencana PKPT yang telah dibuat diawal tahun.</li> <li>- Pelaksanaan pengawasan masih berjalan disesuaikan dengan situasi dan kondisi;</li> <li>- Penyusunan Jakwas 2022 masih dalam tahap perencanaan;</li> <li>- Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan selesai dilaksanakan.</li> </ul>	
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran Data dan informasi</li> </ul>	Sampai dengan TW III, perolehan data dan informasi pengawasan dapat diperoleh sebesar 100%. Perolehan data dan informasi pengawasan di tahun 2021 dilakukan melalui E-pesan dan media <i>Whatsapp</i>	
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal</li> </ul>	Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat. Berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian, Kesesuaian Peran pengawasan Auditor dengan sertifikasi terakhir yang dimiliki telah sesuai 100%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian SAKIP Eselon I</li> <li>- Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan</li> <li>- Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri</li> <li>- Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik</li> </ul>	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen telah mencapai target, yaitu 91% Cara hitung: nilai RB Itjen (komponen pengungkit) = 33,03 dari total nilai 36,3. maka: $33,02/36,3 = 0,91 \times 100\% = 91\%$	
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan</li> </ul>	PKS yang telah dilaksanakan adalah 4 Pelatihan (Januari-September), diklat substansi yg telah diikutsertakan 7. Maka Capaian hingga September 2021: $4/7 \times 100\% = 57.1\%$ 4 PKS, yaitu Penilaian Mandiri SPIP/MRI, PKS penilaian SAKIP tahun 2020, PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP, PKS Overview Manajemen Resiko Indeks	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Pengembangan SDM</li> <li>- Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN</li> <li>- Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN</li> <li>- Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor</li> <li>- Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021</li> <li>- Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal</li> <li>- Koordinasi Pembinaan Kepegawaian</li> </ul>	Hingga September 2021, terdapat 56 orang pegawai yang mendapatkan diklat kompetensi dari total 106 APIP. $56/106 \times 100\% = 53\%$	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW III	Capaian TW III	Keterangan
		Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah disediakan informasi tentang hukum yang dapat diakses melalui hukumonline.com serta pencetakan informasi hukum dan referensi pengawasan.</li> <li>- Hingga September 2021, belum ada pelanggaran kode etik auditor, berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian</li> </ul>	
		Layanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Fasilitas Perkantoran</li> <li>- Pembayaran Gaji dan Tunjangan</li> <li>- Honorarium Operasional</li> <li>- Persediaan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Biaya Langganan dan operasional perkantoran</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>- Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>- Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>- Workshop Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Pelayanan Perbendaharaan</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan rutin bulanan</li> <li>- Laporan rutin perbendaharaan</li> <li>- Laporan LK dan BMN setiap semester</li> <li>- Gaji dan tunjangan tiap bulan</li> </ul>	

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat masih banyak kinerja yang belum menggambarkan pencapaian target kinerja, dikarenakan pengukuran baru dapat dilakukan setelah semua unsur-unsur pengukuran terpenuhi.

Tabel 7 Realisasi kegiatan/output Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	0	0	0	0	0	0	-	-
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Layanan Sarana Internal	1 Unit	0	0	0	0	0	0	-	-
4	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	0	0	1	1	0	0	-	-
5	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13 Laporan	4	4	2	2	2	2	-	-
6	Bantuan Produk	200 Paket	0	0	200	200	0	0	-	-

Sedangkan pencapaian keluaran dan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal secara rinci dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 8 Kegiatan Fisik &amp; Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2021

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Triwulan III			s/d Triwulan III			Sisa Anggaran s/d Triwulan III	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	J u m l a h (Rp)	%
Layanan Perkantoran	20.794.871.000	22,9	4.423.401.939	21,3	66,86	14.258.315.798	68,57	6.536.555.202	31,43
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Intrnal	3.683.403.000	17,69	774.770.038	21,03	51,41	2.201.814.909	59,78	1.481.588.091	38,52
Layanan Sarana Internal	647.540.000	0	0	0	0	587.544.980	90,73	59.995.020	9,27
Layanan Pengawasan Internal	346.420.000	54,17	113.340.864	32,72	80,63	183.413.092	52,95	163.006.908	47,05
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	440.740.000	8,49	86.479.392	19,62	51,75	226.085.095	51,30	214.654.905	48,70
Bantuan Produk	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	100	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>26.512.974.000</b>	<b>21,86</b>	<b>5.397.992.233</b>	<b>20,36</b>	<b>62,99</b>	<b>18.057.173.874</b>	<b>68,11</b>	<b>8.455.800.126</b>	<b>31,89</b>

### **C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan III sebagian besar telah berjalan sesuai dengan rencana. Namun, belum semua dapat menghasilkan output (keluaran) yang dapat diukur karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan dan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang harus diselesaikan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

1. Adanya perubahan struktur organisasi yang sudah diberlakukan di Triwulan II dan juga perubahan formasi pegawai di Triwulan III mengakibatkan kurang optimalnya pendelegasian tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan;
2. Kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal, belum didukung oleh media yang memadai seperti aplikasi yang dapat menyimpan bukti dukung tindak lanjut agar lebih mudah menginventarisir dan lebih mudah dikoordinasikan dengan ketua tim auditor yang memeriksa;
3. Masih ada beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya revisi kegiatan dan anggaran.

### **D. Langkah Tindak Lanjut**

Upaya dan langkah tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan agar mengoptimalkan kegiatan pada triwulan IV;
2. Seluruh pegawai Inspektorat Jenderal agar memaksimalkan kebijakan *work from home* maupun *work from office* dalam pelaksanaan penugasan;
3. Koordinasi antara Inspektorat dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal diharapkan dapat meningkat sehingga

kinerja pengawasan dan dukungannya dapat berjalan dengan optimal.

## **BAB IV. PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan III Tahun 2021 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Pada Triwulan III capaian fisik mencapai 21,86% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp5.397.992.233,- atau 20,36% dari pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp26.512.974000,-.

Pada Triwulan IV diharapkan seluruh kegiatan dapat selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu koordinasi seluruh pihak terkait agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal periode Triwulan III Tahun 2021, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN

Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> </ul>	91,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/p emutakhiran Data Tindak Lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/p emutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/p emutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>- Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal</li> </ul>	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinator TL dan EHP)
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>	Sekretaris Inspektorat Jenderal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	8%	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)			
		Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	1,4%	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	71%	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	- Forum komunikasi PMPRB - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian	- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi EHP)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Level 3	-	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Keuangan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal -Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri -Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	75%	-	-	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Keuangan
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	-Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 -Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra - Penyusunan / Penyempurnaan	IACM Level 3	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Penilaian SAKIP Eselon	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Reviu Perkin dan Renstra - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP -Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Pra evaluasi SAKIP ITJEN			II -Pra evaluasi SAKIP ITJEN				
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	77%	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator bagian Umum
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	- Pengembangan Informasi Pengawasan -Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal -Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi -Penerbitan Majalah Solusi	25%	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi	- Pengembangan Informasi Pengawasan - Pengelolaan Media Informasi Pengawasan - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Sosialisasi Aplikasi yang Terintegrasi - Penerbitan Majalah Solusi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator bagian Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	55%	- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan - Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian	80%	- Koordinasi Program Pengawasan - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian	- Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			-Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL				Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL		
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	- Pemutakhiran Data dan Informasi	90%	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	- Pemutakhiran Data dan Informasi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	90%	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil	91%	-Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang	- Penilaian SAKIP Eselon I - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP		industri - Penyusunan Laporan APIP	terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP	Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan		60%	PKS	PKS	PKS	PKS		Koordinator Kepegawaian
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	75%	- Koordinasi Pengembangan SDM - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 - Fasilitasi Bebas	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian			Pembinaan Kepegawaian	Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian		
		Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	92%	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan -Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor	- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan -Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik Auditor	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Layanan Perkantoran	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor -Biaya Langganan	12 Layanan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional - Persediaan dan Perlengkapan	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor	- Peningkatan Fasilitas Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Honorarium Operasional -Persediaan dan Perlengkapan Kantor	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator bagian Umum dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			<p>dan operasional perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>-Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>-Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>-Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>-Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Pelayanan Perbendaharaan</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN</li> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan dan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor</li> <li>- Biaya Langganan dan operasional perkantoran</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>- Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>- Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor</li> <li>- Biaya Langganan dan operasional perkantoran</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>- Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>- Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>- Workshop Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Biaya Langganan dan operasional perkantoran</li> <li>- Koordinasi dan layanan pimpinan</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Operasional Kantor</li> <li>-Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan</li> <li>-Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif</li> <li>- Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal</li> <li>- Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>-Pelayanan Perbendaharaan</li> <li>-Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan</li> </ul>			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			BMN -Penyusunan RK-BMN		Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	Kearsipan Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Pelayanan Perbendaharaan - Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN	BMN -Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	BMN -Penyusunan RK-BMN		

**LAMPIRAN FORM A**



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
(Aplikasi Form A)  
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021  
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 )**

FORMULIR A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021  
 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

- I. DATA UMUM**
- 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
  - 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
  - 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
  - 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
  - 5. Indikator Hasil : 6036 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal
  - 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 1/1
  - 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : Ir. Liliek Widodo, MSI
  - 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 4
  - 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : SP DIPA- 019.06.1.247885/2021
  - 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

**II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN**

1 Nomor Kode dan Nama Output	2 No. Loan	3 Anggaran (Rp. 000)		5 Total	6 Indikator Keluaran (Output)	7 Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah			
EAA Layanan Perkantoran	-	-	22,794,871	22,794,871		1 Layanan
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	-	-	4,519,854	4,519,854		1 Layanan
EAD Layanan Sarana Internal	-	-	590,000	590,000		1 unit
EAK Layanan Pengawasan Internal	-	-	557,932	557,932		2 Laporan
EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	-	-	748,600	748,600		13 Laporan
<b>Total</b>			<b>29,211,257</b>	<b>29,211,257</b>		



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Liliék Widodo  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan  
Jabatan : Inspektur Jenderal

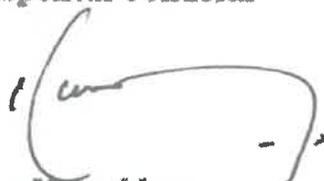
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021  
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Inspektur Jenderal



Masrokhan



Liliék Widodo

**PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2021**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>			
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 laporan
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 laporan
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 laporan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	1 kegiatan
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	Level 3 IACM
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>			
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Ketersediaan Sistem Informasi Pengawasan untuk audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25%
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55%
		Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	90%
		Ketersediaan data dan informasi pengawasan yang memadai	90%
		Komponen Pengungkit Penerapan Reformasi Birokrasi di unit Inspektorat Jenderal	91%
5	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%
		Kepatuhan terhadap kode etik auditor dalam menjalankan tugas pengawasan	92%
		Terselenggaranya layanan perkantoran Inspektorat Jenderal	12 Bulan Layanan

**KEGIATAN**

**Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal**

- Layanan Perkantoran
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
- Layanan Sarana Internal
- Layanan Pengawasan Internal
- Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

**ANGGARAN**

**Rp32,643,630,000**

Rp25,107,244,000

Rp5,593,596,000

Rp590,000,000

Rp568,290,000

Rp784,500,000

**Total Anggaran Tahun 2021 : Rp32,643,630,000**

(Tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Inspektor Jenderal,

  
Masrokh

Jakarta,

Sekretaris Inspektorat Jenderal

2021

  
Liliek Widodo



## Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

## Monitoring Capaian

## Sasaran &amp; Indikator

## Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
<b>1. Terwujudnya keefektifan dan keefisienan program kerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian</b>													
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi *) IKU	91,5 persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72%	58%	90 persen
	Pagu = Rp. 176.080.000												
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	62%	90 Persen
	Pagu = Rp. 138.408.000												
	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	0 Persen
	Pagu = Rp. 52.200.000												
	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU	1,4 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	67%	0 Persen
	Pagu = Rp. 170.340.000												
	<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 537.028.000</b>												
<b>2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>													
	Nilai RB area penguatan pengawasan	71 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	44%	3 Persen
	Pagu = Rp. 292.934.000												
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kemenperin *) IKU	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	62%	0 Level
	Pagu = Rp. 119.890.000												
	<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 412.824.000</b>												
<b>3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif</b>													
	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 Persen
	Pagu = Rp. 880.000												
	Capaian IACM Itjen *) IKU	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	62%	1 Level
	Pagu = Rp. 1.218.895.000												
	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0 Persen
	Pagu = Rp. 647.540.000												
	<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 1.867.315.000</b>												
<b>4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>													
	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	65%	1 Persen
	Pagu = Rp. 44.160.000												
	Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	15%	0 Persen

Pagu = Rp. 28.400.000

Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%	49%	0 Persen
---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----------

Pagu = Rp. 183.640.000

Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----------

Pagu = Rp. 11.036.000

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66%	8%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----------

Pagu = Rp. 27.400.000

Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	25%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	-----	----------

Pagu = Rp. 16.050.000

**Total Pagu Sasaran = Rp. 310.686.000**

#### 5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	17%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	-----	----------

Pagu = Rp. 13.000.000

Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%	66%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----------

Pagu = Rp. 79.400.000

Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	23%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	-----	----------

Pagu = Rp. 9.400.000

Layanan Perkantoran	12 Layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	75%	0 Layanan
---------------------	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----------

Pagu = Rp. 23.512.049.000

**Total Pagu Sasaran = Rp. 23.613.849.000**

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian



## Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Setitjen TA 2021

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.c. Biaya Langganan Dan Operasional Perkantoran	1.192.630.000	0,00%	94,00%	82,00%	73,00%
2.	6036.EAA - 6036.eaa.001.001.a. Gaji Dan Tunjangan	15.467.091.000	0,00%	78,91%	82,00%	73,00%
3.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.a. Honorarium Operasional	1.918.357.000	0,00%	68,21%	82,00%	73,00%
4.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.b. Persediaan Dan Perlengkapan Kantor	461.575.000	0,00%	49,31%	82,00%	73,00%
5.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.e. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Operasional Kantor	881.830.000	0,00%	74,66%	82,00%	73,00%
6.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.d. Koordinasi Dan Layanan Pimpinan	873.388.000	0,00%	51,14%	82,00%	73,00%
7.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. C. Pelayanan Umum Dan Rapat Kedinasan	670.956.000	0,00%	95,49%	100,00%	74,00%
8.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. B. Penataan Dan Penghapusan Arsip/dokumen Pengawasan Dari Arsip Inaktif	14.000.000	0,00%	85,71%	90,00%	70,00%
9.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. A. Koordinasi Dalam Rangka Penataan Ketatausahaan Dan Kearsipan Inspektorat Jenderal	105.340.000	0,00%	20,13%	88,00%	66,00%
10.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.k. Fasilitas Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun Pns Inspektorat Jenderal	15.000.000	0,00%	43,96%	100,00%	75,00%
11.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.j. Pemantauan Dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Itjen	9.400.000	0,00%	23,28%	80,00%	64,00%
12.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.g. Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai Itjen	13.000.000	0,00%	16,86%	100,00%	100,00%
13.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.f. Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi Sdm Inspektorat Jenderal	27.400.000	0,00%	8,00%	99,00%	66,00%
14.	6036.EAB - 6036.eab.001.057.d. Pengembangan Informasi Pengawasan	44.160.000	0,00%	64,90%	90,00%	80,00%
15.	6036.EAB - 6036.eab.001.059. A. Pemutakhiran Data Dan Informasi	11.036.000	0,00%	0,00%	80,00%	70,00%
16.	6036.EAB - 6036.eab.001.059. B. Penerbitanmajalah Solusi	152.500.000	0,00%	47,15%	82,00%	73,00%
17.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. A. Pelaksanaan Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	23.016.000	0,00%	11,08%	100,00%	100,00%
18.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. B. Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	16.050.000	0,00%	24,98%	100,00%	100,00%
19.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. C. Penilaian Index Manajemen Risiko (mri) Kementerian Perindustrian	119.890.000	0,00%	62,40%	33,00%	0,00%
20.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. D. Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian(pmprb)	120.650.000	0,00%	71,31%	100,00%	100,00%

21.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. E. Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas Dalam Rangka Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih	149.268.000	0,00%	26,02%	100,00%	100,00%
22.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. F. Pembinaan Dan Pengawasan Pimpinan	267.280.000	0,00%	96,20%	0,00%	0,00%
23.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.e. Reviu Rk Bmn	5.080.000	0,00%	43,31%	0,00%	0,00%
24.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.e. Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	31.000.000	0,00%	46,45%	100,00%	100,00%
25.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.d. Pelatihan Di Kantor Sendiri (in-house Training)	39.000.000	0,00%	91,82%	90,00%	81,00%
26.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.b. Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal	282.250.000	0,00%	38,19%	90,00%	81,00%
27.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.c. Fasilitasi Reviu Rkaki	12.000.000	0,00%	75,00%	100,00%	50,00%
28.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.d. Penyusunan Pkpt Inspektorat Jenderal	9.100.000	0,00%	12,09%	66,00%	49,00%
29.	6036.EAB - 6036.eab.001.051. A. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2022	152.000.000	0,00%	76,64%	50,00%	80,00%
30.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.e. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Program Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	344.960.000	0,00%	98,70%	82,00%	73,00%
31.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.a. Pelayanan Perbendaharaan	117.640.000	0,00%	68,99%	82,00%	82,00%
32.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan Dan Bmn	71.250.000	0,00%	12,31%	82,00%	73,00%
33.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.c. Penyusunan Laporan Keuangan Dan Bmn	11.890.000	0,00%	0,00%	100,00%	80,00%
34.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.d. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	1.560.000	0,00%	42,31%	50,00%	50,00%
35.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.f. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Keuangan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	96.000.000	0,00%	99,13%	82,00%	73,00%
36.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.a. Pengelolaan Pelayanan, Bantuan Dan Konsultasi Hukum	138.408.000	0,00%	61,59%	82,00%	73,00%
37.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.b. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal	18.200.000	0,00%	12,09%	0,00%	0,00%
38.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.c. Penyusunan Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja	20.200.000	0,00%	59,12%	100,00%	100,00%
39.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.d. Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor	9.400.000	0,00%	23,40%	100,00%	100,00%
40.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.e. Evaluasi Kelembagaan Internal Dan Organisasi Inspektorat Jenderal	10.200.000	0,00%	21,49%	80,00%	70,00%
41.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.f. Pembinaan Dan Pengawasan Aspek Kepegawaian Dan Tata Laksana Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	337.500.000	0,00%	98,71%	0,00%	0,00%
42.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal	153.654.000	0,00%	68,15%	82,00%	73,00%
43.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.b. Penyusunan Dan Revisi Rkaki Inspektorat Jenderal	63.165.000	0,00%	3,48%	82,00%	73,00%
44.	6036.EAD - 6036.ead.001.052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	647.540.000	0,00%	99,51%	0,00%	0,00%
45.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. A. Koordinasi Dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	170.340.000	0,00%	67,12%	80,00%	60,00%
46.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. C. Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi Dan Reviu Inspektorat Jenderal	15.720.000	0,00%	13,80%	82,00%	64,00%
47.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. D. Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan	50.000.000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
48.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. B. Temu Teknis	110.360.000	0,00%	90,07%	80,00%	60,00%

## Penyuluhan / Pemutakhiran Data Tindak Lanjut

49.	6036.EAL - 6036. Eal.001.052. F. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/evaluasi Hasil Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	52.200.000	0,00%	98,93%	0,00%	0,00%
50.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. D. Penyusunan Laporan Apip	3.400.000	0,00%	64,47%	0,00%	0,00%
51.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. C. Penyusunan Laporan Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	3.960.000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
52.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. B. Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Terkait Isu-isu Aktual Bidang Industri	109.200.000	0,00%	73,07%	82,00%	64,00%
53.	6036.EAL - 6036. Eal.001.052. E. Penilaian Sakip Eselon I	1.100.000	0,00%	99,82%	100,00%	100,00%
54.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. A. Koordinasi Analisis Dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan	88.120.000	0,00%	29,02%	80,00%	64,00%
55.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. E. Reviu Renstra	4.480.000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
56.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. D. Penilaian Sakip Eselon II Itjen	1.760.000	0,00%	99,43%	100,00%	100,00%
57.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. C. Penyusunan Dan Reviu Lakin Itjen Dan Set Itjen	1.100.000	0,00%	99,82%	100,00%	100,00%
58.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. B. Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan, Reviu Perkin	1.100.000	0,00%	99,82%	100,00%	75,00%
59.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. A. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Kerja	173.440.000	0,00%	51,07%	100,00%	100,00%
60.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. F. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	880.000	0,00%	0,00%	33,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>25.912.974.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,26%</b>	<b>76,64%</b>	<b>67,93%</b>

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian